



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. Tomas Koryesin**, tempat tanggal lahir Meyano, 6 Februari 1986, Umur 38 tahun, NIK 8171030602860001, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honoror (UPTD Kebersihan), beralamat di Jalan Cendrawasih, RT.002/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Alamat email: tomaskoryesin898@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**2. Demetria Nifangeljau**, tempat tanggal lahir Ambon, 17 November 1988, Umur 36 tahun, NIK 8103085711880001, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN (PPPK Dinas Transnaker), beralamat di Jalan Cendrawasih, RT.002/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, email: demetrianifangeljau@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Para Pemohon tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 Para Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen Katolik di Gedung Gereja Santo Agustinus, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2018 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor: 472.22/101/DKPS/2016, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak J.N.Persulesy, S.Sos, MH.

3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yakni: VERONIKA NOVELA KORYESIN lahir di Saumlaki, tanggal 17 November 2015, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-22072019-0026.
4. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon II yakni sebagai P3K (Kantor TRANSSNAKER) sehingga anak pemohon dapat dimasukan ke dalam daftar gaji Pemohon II namun terkendala karena anak Pemohon II lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.
5. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak Para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak atas nama VERONIKA NOVELA KORYESIN lahir di Saumlaki, tanggal 17 November 2015, sesuai dengan akte kelahiran nomor: 8107-LT-22072019-0026, Adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 817103060286001, atas nama Tomas Koryesin;
2. Bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8103085711880001 atas nama Demetria Nifangeljau;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



3. Bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 8171032601080370, atas nama Kepala Keluarga Tomas Koryesin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 19 Agustus 2022;
4. Bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: AK.913.0004463, atas nama Tomas Koryesin dengan Demetria Nifanngeljau, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 April 2018;
5. Bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: AK.913.0004463, atas nama Tomas Koryesin dengan Demetria Nifanngeljau, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 April 2018;
6. Bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.913.0048072, atas nama Veronika Novela Koryesin, tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Mezaac C. Kailem, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak Para Pemohon untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon menikah;
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Agustinus Meyano Das di Saumlaki;
  - Bahwa Saksi tidak datang ke pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;
  - Bahwa Saksi tahu perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di catatan sipil dari cerita Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak dari Para Pemohon merupakan anak berjenis kelamin perempuan bernama Novela yang lahir pada tanggal 17 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Novela lahir sebelum atau sesudah Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat Novela lahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Novela lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak;

## 2. Saksi Kasparina Yempormas, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak Para Pemohon untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Agustinus Meyano Das di Saumlaki;
- Bahwa Saksi tidak datang ke pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkawinan Para Pemohon dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Para Pemohon merupakan anak berjenis kelamin perempuan bernama Veronika Novela Koryesin yang lahir pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Veronika Novela Koryesin lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tahu Veronika Novela Koryesin lahir sebelum Para Pemohon menikah dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak datang pada saat Veronika Novela Koryesin lahiran;
- Bahwa Veronika Novela Koryesin lahir di Saumlaki;
- Bahwa saat ini Veronika Novela Koryesin berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah kelas III SD;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dobo sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 817103060286001, atas nama Tomas Koryesin dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8103085711880001 atas nama Demetria Nifanngeljau, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT.002/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Paulus Mezaac C. Kailem dan Saksi Kasparina Yempormas;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: AK.913.0004463, atas nama Tomas Koryesin dengan Demetria Nifangeljau, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 April 2018 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: AK.913.0004463, atas nama Tomas Koryesin dengan Demetria Nifangeljau, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 April 2018, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Paulus Mezaac C. Kailem dan Saksi Kasparina Yempormas, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2015 di Gereja St. Agustinus Meyano Das Maluku Tenggara Barat dihadapan pemuka Agama Kristen Katolik yang bernama Pastor P. Serin. Pr. dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 05 April 2018, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.913.0048072, atas nama Veronika Novela Koryesin, tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 8171032601080370, atas nama Kepala Keluarga Tomas Koryesin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 19 Agustus 2022, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Veronika Novela Koryesin yang lahir di Saumlaki pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paulus Mezaac C. Kailem dan Saksi Kasparina Yempormas yang saling bersesuaian bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon sebelumnya telah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Veronika Novela Koryesin;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Paulus Mezaac C. Kailem dan Saksi Kasparina Yempormas yang saling bersesuaian bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah juga guna kepentingan administrasi untuk penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.913.0048072, atas nama Veronika Novela Koryesin, tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa dalam bukti surat P-6 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Veronika Novela Koryesin di Saumlaki pada tanggal 17 November 2015, anak kesatu Perempuan dari Ayah Tomas Koryesin dan Ibu Demetria Nifanngeljau, padahal anak dari Para Pemohon tersebut merupakan anak luar kawin oleh karena perwakinan Para Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 05 April 2018, sehingga seharusnya untuk mencantumkan nama ayah yaitu Tomas Koryesin atau Pemohon I pada akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut, seharusnya baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak barulah kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Paulus Mezaac C. Kailem dan Saksi Kasparina Yempormas bahwa anak Perempuan yang bernama Veronika Novela Koryesin yang lahir di Saumlaki pada tanggal 17 November 2015, adalah benar anak dari Para Pemohon yang lahir setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 di Gereja St. Agustinus Meyano Das Maluku Tenggara Barat dihadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama Pastor P. Serin, Pr. dan sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 05 April 2018, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitem angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa “Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Veronika Novela Koryesin, yang lahir di Saumlaki pada tanggal 17 November 2015 berdasarkan Kutipan

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran: 8107-LT-23072019-0026 tanggal 24 Juli 2019 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Septinus Barends, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Septinus Barends

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkas/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp60.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)